



PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN

Jl. Tripandita No. 17  
(0351) 897113

[inspektorat@magetankab.go.id](mailto:inspektorat@magetankab.go.id)

Website : [inspektorat.magetan.go.id](http://inspektorat.magetan.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Magetan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya.

Magetan, 21 Juli 2022  
**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**



**ARI WIDYATMOKO, S.E.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650904 198603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>6</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
	2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23</b>
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	23
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
	3.3 Program dan Kegiatan.....	27
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>29</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>37</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Inspektorat mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja Inspektorat adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD dan RPJMD. Rencana kerja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan renja Inspektorat Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2023 yang berada dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, Renstra Inspektorat dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Inspektorat, sesuai dengan rencana program prioritas pada Inspektorat juga disusun berdasarkan Renstra Inspektorat, dimana Renstra Inspektorat menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang \_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Magetan Tahun 2018-2023;
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun dan memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
6. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2018-2023
7. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Uraian ringkas tentang landasan hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun daerah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renja Perangkat Daerah.

# **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu – isu strategis lainnya.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan (Tabel T-C.32).

# **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, targetcapaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu. Juga dicantumkan ranggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 pada umumnya program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7	8		9	10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	241,5	angka	81,09	angka	80	angka	81,09	angka	101,60	80,5	angka	-	0
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	-	11	Dokumen	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	10	Dokumen	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	18	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	18	50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	109,57	12	bulan	18	50
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100,00	2	kali	3	50

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135	orang	56	orang	47	orang	56	orang	119,15	45	orang	74	55
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>36</b>	<b>bulan</b>	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	18	50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	bulan	56	orang	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	391
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	bulan	56	orang	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36	bulan	56	orang	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6</b>	<b>unit</b>	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	2	Unit	1	17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00	0	Unit	1	17
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36</b>	<b>bulan</b>	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	Bulan	18	50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	18	50,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>%; %;</b>	<b>118,35</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	136,70	12	bulan	18	50
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24	Dokumen	25	Dokumen	8	Dokumen	25	Dokumen	312,50	8	Dokumen	30	125
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	165	Dokumen	78	Dokumen	55	Dokumen	78	Dokumen	141,82	55	Dokumen	104	63
Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	39	Dokumen	9	Dokumen	13	Dokumen	9	Dokumen	69,23	13	Dokumen	13	33
Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	3	100
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	54	Dokumen	24	Dokumen	18	Dokumen	24	Dokumen	133,33	18	Dokumen	24	44
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	18	50
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	6	kali	14	33,33

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	Bulan	100,00	12	bulan	18	50
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	5	Dokumen	19	127
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	2	Dokumen	18	300
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	1	33
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	Dokumen	1	33
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>36</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>18</b>	<b>50</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	8	Dokumen	5	21
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	1	Dokumen	4	133
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	2	Dokumen	13	217
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00	2	Dokumen	13	217

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Magetan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya.

### Capaian Indikator Kerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a	b	c	d	E
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3	2+
2	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP
		Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	90	100
		Presentase kepatuhan penyampaian LHKASN	75	88

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Magetan Tabel T-C.30. adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Inspektorat Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Level Kapabilitas APIP			3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	
2	Opini BPK (opini)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)			90	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	90	100	100	90	<b>90</b>	
5	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100	<b>100</b>	
6	Rata-rata pencapaian Nilai AKIPSKPD			BB	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	B	BB	BB	A	<b>A</b>	
7	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN					75	85	100	-	-	88	85	100	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Inspektorat Kab. Magetan tahun 2021 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

Pada Tahun 2021, penilaian secara mandiri terhadap peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magetan belum memperoleh hasil sehingga hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magetan mengacu pada hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2019, yaitu masih berada di level 2+

Pada tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 25 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan dan ditindaklanjuti, dengan demikian realisasinya sebesar 100%.

Sasaran pada indikator ini adalah kegiatan evaluasi SAKIP SKPD dimana pada tahun 2020 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 54 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat terhadap SKPD, rata-rata pencapaian Nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai BB.

Akan tetapi, hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum dapat dilaporkan karena sampai dengan laporan ini dibuat, penilaian SAKIP belum dilaksanakan.

Opini BPK Kabupaten Magetan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir dapat memenuhi target yang diharapkan. Kabupaten Magetan mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian, hal ini berarti pada saat dilakukan penilaian segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2021 adalah WTP yaitu wajar tanpa pengecualian.

### **2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Inspektorat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas terdapat kegiatan yang secara mandatori harus dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu antara lain perhitungan kerugian Negara (PKN), Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Koordinasi antara APIP dan APH, Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korupsi) KPK.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas yaitu membantu Bupati bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:  
Kapabilitas APIP masih belum optimal

1. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat.
2. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD.
4. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
5. Peningkatan kinerja ASN.
6. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah SDM APIP yang ada belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
2. Strategi pengawasan belum memadai.
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai
4. Sarana pengaduan masyarakat kurang memadai.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan dalam rangka evaluasi tugas-tugas Inspektorat untuk tahun berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
2. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern termasuk dalam peningkatan penerapan SAKIP.
3. Adanya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal;
4. Adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan masyarakat.
5. Adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal.
2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Magetan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magetan ini.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD**

Seiring dengan penguatan APIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, maka pada tahun 2023 Inspektorat memiliki 3 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Rencana Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Magetan mengajukan pagu sebesar **Rp. 6.052.583.991,-** (Enam milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah), kegiatan yang dilaksanakan di fokuskan kepada 2 (dua) program strategis dan 1 (satu) program penunjang untuk merealisasikan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ranwal RKPD sebesar Rp 3.781.999.491,-. Hasil analisis kebutuhan anggaran ada perubahan pada beberapa sub kegiatan, Yaitu sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat perubahan rencana pengadaan untuk jumlah dan jenis item barang, serta Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, perubahan pada target serta kode rekening belanja .
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Ranwal RKPD sebesar Rp 1.824.584.500,- . Hasil analisis kebutuhan anggaran dan target kinerja ada perubahan. Rencananya untuk Tahun 2023 akan dilaksanakan Reviu Laporan kegiatan reviu DAK, reviu Dana BOS, Reviu Dana Desa, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Monev Desa, Probitiy Audit dan Audit Kinerja begitu juga pada kegiatan pengawasan secara berkala sesuai perbup perjalanan dinas dalam daerah pemberian uang saku APIP sebesar Rp 100.000,- per hari. Dari hasil laporan monev Desa, akan dianggarkan pemberian *reward* kepada desa dengan pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Kemudian setiap tahun digelar Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) agar setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban APIP.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Ranwal menjadi Rp. 446,000,000,-. Tidak perubahan Hasil analisis kebutuhan anggaran dan target kinerja.

Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Magetan menyusun rencana kebutuhan sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dibawah ini:

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**  
**TAHUN 2023 INSPEKTORAT KABUPATEN**  
**MAGETAN**

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>81 Angka</b>	<b>3.781.999.491</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>81 Angka</b>	<b>3.781.999.491</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>45.000.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>45.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kabupaten</b>	10 Dokumen	20.000.000	Kabupaten	10 Dokumen	20.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kabupaten</b>	10 Dokumen	25.000.000	Kabupaten	10 Dokumen	25.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.771.109.491</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.771.109.491</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kabupaten</b>	48 Orang/bulan	2.771.109.491	Kabupaten	48 Orang/bulan	2.771.109.491
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>384.490.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>384.490.000</b>

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>Kabupaten</b>	2 Dokumen	24.490.000	Kabupaten	2 Dokumen	24.490.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Kabupaten</b>	45 Orang	360.000.000	Kabupaten	45 Orang	360.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten	<b>12 Bulan</b>	<b>262.300.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>262.300.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	2 Paket	3.000.000	Kabupaten	2 Paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	6 Paket	100.000.000	Kabupaten	6 Paket	100.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten	1 Paket	8.000.000	Kabupaten	1 Paket	8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	8 Paket	35.000.000	Kabupaten	8 Paket	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	5 Paket	20.000.000	Kabupaten	5 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten	2 Dokumen	6.300.000	Kabupaten	2 Dokumen	6.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	6 Laporan	90.000.000	Kabupaten	6 Laporan	90.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten	1 Unit	20.000.000	Kabupaten	1 Unit	20.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten	1 Unit	20.000.000	Kabupaten	1 Unit	20.000.000
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten	12 Bulan	199.300.000	Kabupaten	12 Bulan	199.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	12 Laporan	40.000.000	Kabupaten	12 Laporan	40.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	12 Laporan	134.300.000	Kabupaten	12 Laporan	134.300.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	12 Laporan	25.000.000	Kabupaten	12 Laporan	25.000.000
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten	12 Bulan	99.800.000	Kabupaten	12 Bulan	99.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	6 Unit	95.000.000	Kabupaten	6 Unit	95.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kabupaten	21 Unit	4.000.000	Kabupaten	21 Unit	4.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	12 Bulan	800.000	Kabupaten	12 Bulan	800.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Jumlah Persentase penyelesaian dokumen pengawasan	Kabupaten	100 %	<b>1.824.584.500</b>	Kabupaten	100 %	<b>1.824.584.500</b>
<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Kabupaten	<b>12 Bulan</b>	<b>1.749.584.500</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.749.584.500</b>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	10 Laporan	259.300.000	Kabupaten	10 Laporan	259.300.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	25 Laporan	420.450.000	Kabupaten	25 Laporan	420.450.000
	Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten	10 Laporan	327.710.000	Kabupaten	10 Laporan	327.710.000
	Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten	1 Laporan	30.000.000	Kabupaten	1 Laporan	30.000.000
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten	20 Laporan	256.124.500	Kabupaten	20 Laporan	256.124.500
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten	1 Kesepakatan	156.000.000	Kabupaten	1 Kesepakatan	156.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten	55 Dokumen	300.000.000	Kabupaten	55 Dokumen	300.000.000
9	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Kabupaten	<b>7 Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten	5 Laporan	40.000.000	Kabupaten	5 Laporan	40.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten	5 Laporan	35.000.000	Kabupaten	5 Laporan	35.000.000
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Jumlah Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Kabupaten	100 %	<b>446.000.000</b>	Kabupaten	100 %	<b>446.000.000</b>
10	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	Kabupaten	<b>1 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten	1 Rekomendasi	25.000.000	Kabupaten	1 Rekomendasi	25.000.000
11	<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten	<b>13 Dokumen</b>	<b>421.000.000</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>421.000.000</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	5 perangkat daerah	35.000.000	Kabupaten	5 perangkat daerah	35.000.000

NOMOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten	46 perangkat daerah	36.000.000	Kabupaten	46 perangkat daerah	36.000.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten	4 Kegiatan	300.000.000	Kabupaten	4 Kegiatan	300.000.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten	5 perangkat daerah	50.000.000	Kabupaten	5 perangkat daerah	50.000.000
	<b>TOTAL</b>				<b>6.052.583.991</b>			<b>6.052.583.991</b>

**2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Inspektorat telah mengadakan Forum Perangkat Daerah pada 3 Maret 2021 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari SKPD. Inspektorat tidak mengusulkan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung akan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Magetan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>NIHIL</b>					

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang melakukan penguatan Inspektorat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Penguatan Kelembagaan Inspektorat melalui :

1. Penambahan Fungsi  
Pencegahan Korupsi dan Pengawasan RB menjadi Indikator Kinerja Inspektorat dan kelas jabatan Inspektur Daerah dapat dinaikkan setara dengan/minimal satu tingkat di bawah Sekda.
2. Pola Pelaporan  
LHP terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adanya Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Kepala BPKP tentang pelaksanaan supervisi hasil pengawasan, agar terjaga independensi APIP tidak ada intervensi oleh pihak manapun, mengoptimalkan fungsi BPKP sebagai bagian dari pengawasan internal serta pengawasan APIP terjaga kualitasnya sesuai dengan standar profesi
3. Penambahan Kewenangan  
Penegasan fungsi Inspektorat Daerah sebagai perangkat Gubernur dan wakil pemerintah pusat
4. Kapasitas Kelembagaan  
Penambahan 1(satu) Irban untuk investigatif/penangan dumas. Terdapat unit kerja eselon III yang menangani fungsi secara khusus Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
5. Menjaga Obyektivitas Pengawasan  
Pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin mendagri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bertujuan agar seleksi jabatan Inspektur Daerah menghasilkan calon yang kompeten, terjaga Independensi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan dan pola karier Inspektur Daerah dapat terjaga.

Selain itu prioritas penggunaan anggaran pengawasan digunakan untuk :

1. Pemeriksaan Kinerja
2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
3. Pengawasan yang bersifat Mandatori :
  - a) Kinerja Rutin Pengawasan (Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak, reviu DAK, evaluasi SPIP, monitoring penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi TLHP)
  - b) Pengawasan Prioritas Nasional (Tindak Lanjut Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yangberindikasi korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan Dana BOS)
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan KDH membangun sub area penguatan

- pengawasan)
5. Penegakan Integritas
    - a) Dukungan Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas
    - b) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP, LHKPN dan LHKASN)
  6. Peningkatan Kapabilitas APIP
    - a) Penerapan Manajemen Resiko
    - b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
    - c) Audit Kinerja
    - d) Audit Investigasi
    - e) Pemeriksaan DAK Fisik
    - f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD
    - g) Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan lainnya

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 diprioritaskan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah dalam rangka memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi.

#### Arah Kebijakan Tahunan Selama 5 Tahun MasaRPJMD Tahun 2018-2023



Sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu **“Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera”**, dengan serangkaian Misi Pemerintah Kabupaten Magetan yang diantaranya salah satu dari Misi tersebut adalah **“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil”** artinya yaitu misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pelayanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *Good Governance*. Untuk

keberhasilan misi tersebut Inspektorat ada di dalamnya untuk mendukung misi tersebut maka perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Melalui peningkatan SDM yang professional, dan dilandasi semangat otonomi daerah”, dikaitkan dengan isu strategis yang berkembang maka APIP yang profesional dimaknai bahwa Inspektorat sebagai sebuah lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintah diharapkan mempunyai independensi/kemandirian, integritas, kompetensi, dan netral. Hal tersebut menuntut konsekuensi aparaturnya terlebih untuk pengawas/auditor mampu mengimplementasikan tata nilai - tata nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, serta mematuhi kode etik dan norma pengawasan yang ada. Dalam rangka mendukung mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Magetan, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (jangka menengah) untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut selanjutnya diformulasikan sasarannya. Perumusan tujuan dan sasaran strategis tersebut hendaknya disertai indikator kinerja yang terukur. Hal tersebut akan bermanfaat nantinya bagi Inspektorat Kabupaten Magetan dalam mengukur sejauh mana capaian keberhasilan dalam menjalankan visi – misi pemerintah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah) Inspektorat Kabupaten Magetan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien  <b>Indikator Tujuan:</b> 1. Opini BPK 2. Hasil evaluasi AKIP	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3	3	3	3	3
		2. Meningkatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	a. Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
		3. Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	BB	A	A
			c. Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 90	100 90	100 90	100 90	100 90
		d. Presentase kepatuhan penyampaian LHKASN			75	85	100	

Sesuai tabel tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah SKPD) diatas, terdapat 2 tujuan yang ditetapkan berikut dengan indikator tujuan beserta sasaran dan indikator kinerjanya. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target 60. Sedangkan indikator kinerja Sasaran Inspektorat adalah Opini BPK yaitu WTP dan Hasil Evaluasi AKIP yaitu BB. Secara ringkas Tujuan diatas dapat dinarasikan sebagai berikut

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien”

Mengandung Makna bahwa pola kerja profesional harus lebih dikedepankan dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat, dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika APIP.

APIP harus dapat menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan perannya sebagai aparat pengawasan intern. Tidak kalah pentingnya melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparat pengawasan dengan para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk meningkatkan komitmen dan kesepahaman bersama dari unsur pimpinan tingkat atas, sampai kebawah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan

akuntabel. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rancana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong *good governance* dan *clean goverment* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih.

Mengandung makna APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat. Tetapi akan menjadi tumpuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maju dan modern dengan cara membangun kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik, mewujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik dan menjalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak semua indikator kinerja sebagaimana yang disajikan dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD diatas digunakan dalam pengukuran keberhasilannya. Dalam rangka pengukuran capaian tujuan strategis hanya dipilih beberapa indikator yang mempunyai nilai strategis yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU). IKU beserta target yang ingin dicapai tahun5 (lima) Tahun kedepan dapat djelaskan sebagai berikut:

### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TAR GET	SUMBER DATA	PENANGG UNG JAWAB
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM	3	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani} \times 100}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}}$	100%	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini	WTP	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	BB	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	c. Persentase TL rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)  • BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$	100%	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
		$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi BPK}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$	90%		
d. Presentase kepatuhan penyampaian LHKASN	$\frac{\text{Jumlah sudah Lapo LHKASN}}{\text{Jumlah Wajib Lapo LHKASN}} \times 100$	85	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan	

### 3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Magetan pada tahun 2023 yakni tahun ke-5 dari pelaksanaan RENSTRA 2018-2023, namun adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan, program / kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Rutin dan Program Prioritas yang mendukung Tujuan Perangkat Daerah serta target kegiatannya. Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

- Program dan kegiatan Rutin sebagai berikut :

#### 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :
  - 1) **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
    - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - b) Pendampingan dan Asistensi
  
- Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran II Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut :
  - 1) **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
    - a) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - b) Pendampingan dan Asistensi
  
- Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran III Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :
  - 1) **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
    - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan ini disusun juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)". Inspektorat Kabupaten Magetan membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se- Kabupaten Magetan agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2023 seiring dengan penguatan APIP untuk menyesuaikan keadaan tersebut.

Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Inspektorat memiliki fungsi pengawasan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Inspektorat Kabupaten Magetan

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6																		
6	01																	
6	01	01																
6	01	01	2.01															
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81 Angka	10 Dokumen 10 Dokumen	11 Dokumen	20,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81 Angka	1 Dokumen 4 Laporan	11 Dokumen	25,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	
6	01	01	2.02															
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	48 Orang/bulan 12 Bulan	12 Bulan	2,771,109,491			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	
6	01	01	2.05															
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penyelenggara Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Dokumen 2 Kali	12 Bulan	24,460,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	

6 01 01 2 06 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kadikdas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	45 Orang 45 Orang	12 Bulan	300.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0
6 01 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>262.300.000</b>			<b>0</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	2 Paket 12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0
6 01 01 2 06 01												

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Capaian Program	Misi/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Luas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikat (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikat (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tokuk Ukur	Target	
6 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	6 Paket	12 Bulan	100.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0		
6 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	1 Paket 12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0		
6 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	8 Paket 12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0		
6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	5 Paket 12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0		
6 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81 Angka	2 Dokumen 12 Bulan	12 Bulan	6.300.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0		

6 01 01 2.06 03	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81 Angka	6 Laporan 12 Bulan	90.000.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
6 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81 Angka	1 Unit 1 Unit	20.000.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
6 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Angka	12 Laporan 12 Bulan	40.000.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Angka	12 Laporan 12 Bulan	25.000.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Angka	12 Laporan 12 Bulan	134.300.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
6 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	81 Angka	6 Unit 12 Bulan	95.000.000	81 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Pemerintah Daerah		81 Angka	21 Unit 12 Bulan	12 Bulan	4,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0
6 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Pemerintah Daerah		81 Angka	12 Unit 1 Unit	12 Bulan	800,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Angka	0
<b>6 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>								<b>1,824,584,500</b>					<b>0</b>
<b>6 01 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>								<b>1,748,584,500</b>					<b>0</b>
6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian dokumen pengawasan; Persentase penanganan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100 %	10 Laporan 8 Dokumen	12 Bulan	259,300,000			Persentase penyelesaian dokumen pengawasan; Persentase penanganan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	100 %	0
6 01 02 2 01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian dokumen pengawasan; Persentase penanganan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100 %	25 Laporan 55 Dokumen	12 Bulan	420,450,000			Persentase penyelesaian dokumen pengawasan; Persentase penanganan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan	100 %	0

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktisi Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
6 01 02 2 01 03	Revisi Laporan Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen pengawasaan; Persentase perancangan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja Jumlah Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasaan Internal		100 %	10 Laporan 13 Dokumen	12 Bulan	327.710.000	100 %		0
6 01 02 2 01 04	Revisi Laporan Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen pengawasaan; Persentase perancangan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Jumlah Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasaan Internal		100 %	1 Laporan 1 Dokumen	12 Bulan	30.000.000	100 %		0
6 01 02 2 01 05	Pengawasan Desa	Persentase penyelesaian dokumen pengawasaan; Persentase perancangan pengaduan masyarakat; Persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Pengawasan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasaan Internal		100 %	20 Laporan 16 Dokumen	12 Bulan	206.124.500	100 %		0
6 01 02 2 01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian dokumen pengawasaan; Persentase perancangan pengaduan	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasaan Internal		100 %	12 Bulan 1 Kesepakatan	12 Bulan	156.000.000	100 %		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Praktikn Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikat (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Sub Kegiatan				Tipe	Tarjet		
6 01 02 2 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	masyarakat. Penertase implementasi kebijakan pengendalian dan pemberantasan KKN										perguduan masyarakat; Penertase implementasi kebijakan pengendalian dan pemberantasan KKN		
6 01 02 2 01 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Penertase penyelesaian dokumen pengawasan, Penertase perancangan pengaduan masyarakat; Penertase implementasi kebijakan pengendalian dan pemberantasan KKN	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ATPP	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal						300,000,000		Penertase penyelesaian dokumen pengawasan; Penertase perancangan pengaduan masyarakat; Penertase implementasi kebijakan pengendalian dan pemberantasan KKN	100 %	0
6 01 02 2 02	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan									75,000,000				0
6 01 02 2 02 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Penertase penyelesaian laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						40,000,000		Penertase penyelesaian laporan hasil pengawasan	100 %	0
6 01 02 2 02 02	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Penertase penyelesaian laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						35,000,000		Penertase penyelesaian laporan hasil pengawasan	100 %	0
6 01 03	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan									448,000,000				0
6 01 03 2 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan									25,000,000				0
6 01 03 2 01 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Penertase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Pemusatan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun						25,000,000		Penertase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	100 %	0
6 01 03 2 02	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan									421,000,000				0
6 01 03 2 02 01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Penertase pelaksanaan	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Usulan	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Usulan						35,000,000		Penertase pelaksanaan	100 %	0

Kode	Uraian Bidang Urusan/ Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keuraian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
	Pemerintahan Daerah	perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah			5 perangkat daerah							
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemerintah pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi		100 % 1 Dokumen 46 perangkat daerah	36.000.000				100 %	0	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	Pemerintah pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi		100 % 4 Kegiatan 2 Dokumen 13 Dokumen	300.000.000				100 %	0	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Pemerintah pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Pendampingan dan Asistensi		100 % 2 Dokumen 5 perangkat daerah 13 Dokumen	50.000.000				100 %	0	
<b>TOTAL</b>											<b>8.062.803.984</b>	<b>0</b>	

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2023. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan) sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Magetan, 21 Juli 2022



**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**

**ARI WIDYATMOKO, S.E.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650904 198603 1 001